

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak seimbang. Pulau Jawa yang luasnya 6,9 persen dari luas Indonesia, pada tahun 1980 dihuni oleh lebih dari 60 persen penduduk Indonesia. Pulau Sumatera dengan luas hampir seperempat dari luas Indonesia dihuni oleh 19,0 persen penduduk Indonesia, sedangkan Kalimantan yang luasnya 28,3 persen dari luas daratan Indonesia hanya dihuni oleh 4,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Mantra, 1983:2).

Sebagai akibat pemusatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura ini sangat dirasakan dalam bidang pertanian, seperti sempitnya luas pemilikan lahan suatu keluarga, terutama di Pulau Jawa. Sebagai gambaran dapat dikemukakan data tahun 1973 sebanyak 57 persen petani di pulau Jawa mengusahakan kurang dari 0,5 hektar lahan (rata-rata 0,25 hektar) kelompok ini merupakan petani gurem. Sedangkan yang disebut petani menengah meliputi sebanyak 25 persen, pengusahaan lahan seluas 0,5 - 1 hektar dan kelompok petani dengan luas lahan lebih dari 1(satu) hektar hanya meliputi 18 persen. Dari beberapa penelitian kasus desa di Jawa secara mendalam, diperoleh gambaran bahwa hanya separoh dari golongan petani gurem dapat membebaskan diri dari kemiskinan dengan menambah penghasilan dibidang lain, yaitu petani dengan luas lahan kurang dari 0,25 hektar (Sayogyo, 1977:12). Keadaan pemilikan lahan sepanjang tahun semakin mengkhawatirkan, misalnya hasil penelitian Mantra (1975) di dukuh Kadirejo (Sleman) dan dukuh Piring (Bantul) mendapatkan bahwa rata-rata lahan pertanian (sawah dan pekarangan) yang dimiliki oleh tiap keluarga sangat sempit yaitu 0,13 hektar untuk Kadirejo dan 0,09 hektar untuk Piring. Di kedua dukuh ini lebih dari 50



TABEL 1. PENYEBARAN PENDUDUK INDONESIA PER PULAU 1930, 1960, 1971 DAN 1980.

Pulau	Penduduk (1.000.000)											
	1930		1960		1971		1980		1930		1980	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Jawa dan Madura	6,9	41,7	68,7	63,0	65,0	76,1	63,8	91,3	61,9	60,7	100	
Sumatera	24,9	8,2	13,5	15,7	16,2	20,8	17,5	28,0	19,0	60,7	100	
Kalimantan	28,3	2,2	3,6	4,1	4,2	5,2	4,4	6,7	4,5	60,7	100	
Sulawesi	9,9	4,2	6,9	7,1	7,3	8,5	7,1	10,4	7,1	60,7	100	
Pulau-pulau Lain	30,0	4,4	7,3	7,1	7,3	8,6	7,2	11,1	7,5	60,7	100	
Jumlah	100	60,7	100	97,0	100	119,2	100	147,5	100	60,7	100	

Sumber: I.B. Mantra 1982: 3

persen keluarga tidak memiliki lahan sawah (Mantra, 1978:3).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, sekitar 50 persen dari penduduk di daerah pedesaan Jawa tidak memiliki lahan sawah. Padahal berdasarkan ukuran yang dibuat oleh David Penny dan Masri Singarimbun, untuk hidup layak paling sedikit satu keluarga memiliki 0,7 hektar lahan sawah ditambah dengan 0,3 hektar lahan tegalan atau pekarangan (David Penny dan Masri Singarimbun, 1984:3).

Di samping itu perkembangan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian belum siap menampung kelebihan tenaga kerja sektor pertanian, akibatnya timbul pengangguran yang tinggi, pendapatan yang tidak mencukupi keluarga dan masalah sosial lainnya. Dengan kata lain pemilikan lahan yang terlalu sempit dapat menimbulkan kemiskinan. Di pihak lain di luar pulau Jawa lahan masih luas dan banyak sumber daya alam yang belum dijamah oleh manusia. Oleh sebab itu dengan transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani (Walgito Nototaruna, 1979:13).

Masalah penyebaran penduduk yang tidak seimbang ini sebenarnya sudah terjadi sejak abad 19. Menyadari hal itu, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan kebijaksanaan dengan memindahkan penduduk Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa yang dikenal dengan kolonisasi. Setelah Indonesia merdeka pemindahan penduduk ini masih tetap dilaksanakan hanya saja istilahnya dirubah dengan transmigrasi (Amral Syamsu, 1960:78).

Sebelum Repelita I pada tahun 1969, tujuan transmigrasi ditekankan pada aspek Demografi dengan harapan Pulau Jawa dan Bali dapat dikurangi penduduknya. Mulai Repelita I menyelenggarakan transmigrasi merupakan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan daerah.

Transmigrasi sebagai proyek nasional dipandang perlu untuk produksi nasional.

Dalam Repelita II, kebijaksanaan transmigrasi lebih diarahkan lagi untuk pembangunan satuan desa yang diharapkan dapat berkembang terus menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang dikaitkan dengan pembangunan daerah, sehingga akan mendorong terjadinya transmigrasi spontan (Kartomo Wirosuhardjo dan Sutarsih Mulia Kusuma, 1978:11).

Semenjak Repelita III, tujuan transmigrasi sudah mencakup aspek demografi, ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara "bahwa pelaksanaan transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah pertanian, dalam rangka pembangunan daerah Jawa Bali dan Lombok, yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup" (Ketetapan MPR RI, 1983:90).

Sejak awal Pelita I dalam tahun 1969 transmigrasi telah ditekankan sebagai unsur penting dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan. Hasil program yang relatif baik yang dicapai dalam Pelita I mendorong pemerintah untuk menetapkan target sebanyak 250.000 Kepala Keluarga untuk Pelita II, dan target yang lebih besar untuk Pelita III. Dalam Pelita III tujuan pemerintah untuk memindahkan sebanyak 500.000 Kepala Keluarga dari Pulau Jawa, Madura, Lombok dan Bali (Hardjono, 1980:3; Republik Indonesia, 1984:373).

Setelah target untuk Repelita III dapat dilampaui, maka kegiatan transmigrasi dalam Pelita IV telah ditingkatkan tidak saja dalam segi kuantitas tetapi juga adanya usaha untuk memperbaiki mutu kehidupan bagi transmigran dalam segi kualitas. Diperkirakan selama Repelita IV akan ditransmigrasikan sekitar 750.000 Kepala

Keluarga dari Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ke pulau-pulau lainnya (Republik Indonesia, 1984:391).

Namun demikian keberhasilan pembukaan dan pengembangan daerah baru dipengaruhi oleh:

1. Kondisi lingkungan
2. Usaha-usaha yang membantu transmigran dalam kegiatan pertanian
3. Peranan Pemerintah dalam memberikan fasilitas dan bimbingan untuk menukung kehidupan transmigrasi

Peranan Pemerintah dalam menunjang keberhasilan pengembangan di daerah baru terwujud dalam perencanaan dan pemberian subsidi dengan demikian keberhasilan pengembangan di daerah baru tergantung pada usaha-usaha transmigrasi memanfaatkan lingkungan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah.

Menurut Rukmedi Warsito (1984:76) banyak proyek transmigrasi yang mengalami kegagalan seperti di Riau, Kalimantan Timur dan Jambi. Di Bengkulu pembangunan pemukiman transmigrasi mengalami kegagalan karena tanah yang telah ditempati oleh warga transmigran diambil alih penduduk setempat, karena dianggap tanah leluhur mereka (Kompas, 24 Januari 1984). Sedangkan di Kalimantan Timur, tanah garapan yang diterima transmigran bergambut setinggi 40 cm sehingga tidak dapat ditanami dengan baik. Di Riau kegagalan proyek transmigrasi disebabkan transmigran yang berasal dari daerah pegunungan (lereng gunung Merapi) di tempatkan di daerah pasang surut, sehingga menyebabkan mereka sulit beradaptasi dengan lingkungan, yang semuanya itu menyebabkan warga transmigrasi pulang ke daerah asal atau mencari tempat pemukiman baru di daerah lain.

Di beberapa daerah transmigrasi para transmigran

hanya mampu mengusahakan lahan seluas 1(satu) hektar, walaupun kepadanya disediakan lahan seluas 2 hektar atau lebih, hal ini disebabkan mereka tidak mengetahui teknologi yang tepat yang harus dipergunakan serta tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk membuka sisa lahannya (Sudarsono Hadisaputro, 1978:86). Bahkan ada yang 5(lima) tahun sesudah kedatangan mereka hanya sedikit transmigran yang telah mampu mengolah tanah seluruhnya seluas 2(dua) hektar yang telah diberikan (Guinness, 1977:126).

Di proyek transmigrasi Tajau Pecah (Kalimantan Selatan) ditemukan kasus di Blok B di mana dari 37 Kepala Keluarga (kelompok gotong royong) terdapat 34 Kepala Keluarga yang bekerja pada pemborongan pembuatan jalan yang dilaksanakan oleh pemborong di dalam lokasi proyek transmigrasi, untuk menutupi kekurangan mereka sehari-hari. Akibatnya, peladangan mereka seluas $\frac{3}{4}$ hektar dari masing-masing Kepala Keluarga (KK) yang sudah dibuka, kembali menjadi padang alang-alang (Direktorat Djenderal Transmigrasi, 1977:22). Sedangkan di lokasi transmigrasi Kubu (Kalimantan Barat) banyak transmigran yang meninggalkan lokasi proyek disebabkan karena tidak berhasilnya panen pertama, sedang jaminan hidup telah habis (Kasidi dan Soehardi, 1972:5).

Di lokasi transmigrasi pasang surut (Jambi) akibat terpeencilnya lokasi serta biaya angkutan yang tinggi untuk sampai di Ibu Kota Jambi, transmigran sulit mengembangkan diri mereka meskipun ada yang sudah menetap di sana selama lima belas tahun, kehidupan mereka tidak banyak mengalami perubahan dari ketika mereka didatangkan (Kompas, 7 Mei 1984). Begitu pula di lokasi transmigrasi Pemenang (Jambi), transmigran mengalami masalah dalam hal komunikasi dengan daerah luar, karena baru mempunyai satu

unit kantor pos, sedangkan mengirim surat tercatat, menerima wesel pos dan paket pos masih harus ke Ibu Kota Kabupaten (Bangko) yang berjarak 25 km dari lokasi transmigrasi (Sinar Harapan, 27 Januari 1982). Lain halnya proyek transmigrasi Soraya I (Sulawesi Selatan). daerah ini telah mempunyai Kantor Pos, terletak di pusat desa dan dapat melayani setiap hari kerja, akan tetapi belum banyak transmigran yang memanfaatkan fasilitas tersebut (Kistini dan Sunarpi. Rianto, 1970:30).

Dalam segi pendidikan diketemukan kasus di proyek transmigrasi Talang Rendah (Bengkulu). Setelah umur proyek 3(tiga) tahun ternyata belum mempunyai sekolah, sehingga anak-anak transmigran terpaksa sekolah di Kemumu yang berjarak 2(dua) kilometer dari proyek (Ign. I.S. Soetijoedi dan Soerjanto, 1971:35).

Sampai saat ini masih dirasakan sangat kurangnya penelitian mengenai keadaan sosial ekonomi daerah pemukiman transmigrasi, terutama proyek transmigrasi yang ada di propinsi Jambi. Kenyataan tersebutlah yang menarik minat penulis untuk meneliti pelaksanaan pembangunan daerah pemukiman transmigrasi Rimbo Bujang, dengan judul "Keadaan Sosial Ekonomi Transmigrasi di Unit Pemukiman XI, Rimbo Bujang, Jambi.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Rukmedi Warsito (1984:4) program transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan tujuan Nasional yang ditujukan untuk:

1. Peningkatan taraf hidup
2. Pembangunan daerah
3. Keseimbangan penyebaran penduduk
4. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia
5. Pemanfaatan sumber alam dan tenaga manusia

6. Kesatuan dan persatuan bangsa

7. Memperkuat ketahanan dan keamanan Nasional

Taraf hidup yang layak bagi suatu masyarakat adalah terpenuhinya tingkat konsumsi nyata, sedangkan konsumsi nyata meliputi kebtuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok meliputi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan kesehatan dan pendidikan (Emil Salim, 1980:54). Sedangkan untuk mencapai taraf hidup yang layak bagi suatu masyarakat, diperlukan beberapa faktor penunjang. Adapun faktor-faktor penunjang menurut Soedigdo Hardjosudarmo (1965:19) sebagai berikut:

1. Sumber alam yang memberikan kemungkinan untuk dapat diusahakan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat..
2. Penemuan (invention), yang menggambarkan kemajuan-kemajuan teknik, sebagai misal: kemajuan penggunaan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik.
3. Organisasi sosial, yang menunjukkan daya guna dalam proses pembentukan barang dan penyaluran kerja, sistim perdagangan, sistim kredit dan sebagainya.
4. Penduduk, yang merupakan angka pembagi untuk menunjukkan tingkat taraf hidup suatu masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa untuk mencapai tingkat taraf hidup layak bagi suatu masyarakat harus tersedia sumber daya alam, pengusaha teknologi untuk mengolah sumber daya alam tersebut, tersedia organisasi sosial yang mampu mengatur manajemen dalam usaha meningkatkan taraf hidup serta tersedianya tenaga kerja yang terdidik/terlatih.

Sebagaimana telah di utarakan di muka bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya transmigrasi adalah untuk

meningkatkan taraf hidup warga masyarakat terutama transmigran itu sendiri. Untuk itulah maka melalui program transmigrasi, para transmigrasi diharapkan mampu mengolah sumber daya alam yang diserahkan kepada mereka, yang belum dimanfaatkan, dalam usaha peningkatan kesejahteraan.

Melalui program transmigrasi, para transmigran diberi sebidang tanah yang luasnya 5(lima) hektar, dengan perincian 1(satu) hektar untuk tanah pekarangan, peternakan dan tanaman pangan, 2(dua) hektar lagi untuk tanaman diversifikasi dan sisanya 2(dua) hektar untuk tanaman perkebunan/comodity export (Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jambi, 1983:7). Di samping memperoleh tanah beserta rumah, para transmigran masih memperoleh bantuan jaminan hidup beserta bantuan modal kerja yang berupa alat-alat pertanian, bibit, pupuk serta obat pemberantas hama(Martono, 1978: 72). Bantuan tersebut diberikan selama satu tahun bagi para transmigran yang menempati areal tanah kering dan dealapan belas bulan bagi transmigran yang menempati lokasi pasang surut.

Walaupun di dalam manajemennya, program transmigrasi belum seperti yang diharapkan, namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah bahwa beberapa proyek yang diharapkan dengan baik, telah menunjukkan hasil nyata yang cukup menggembirakan yaitu perbaikan kondisi hidup (Collin Mac Andrew dan Rahardjo, 1983:100). Bila dibandingkan dengan sewaktu mereka masih tinggal di daerah asal, kehidupan para transmigran di daerah pemukiman yang baru, jauh lebih baik (Fachrurrozi dalam Collin Mac Andrew dan Rahardjo, 1983:90).

Menurut Mayling Oey (1978:144-164) bahwa yang menjadi ukuran keberhasilan suatu proyek transmigrasi adalah

pendapatan (income) dan penyesuaian (integration) transmigran di tempat yang baru. Tinggi rendahnya pendapatan transmigrasi banyak ditentukan oleh faktor-faktor: kualitas tanah dan kemampuan air, luas lahan, teknologi, informasi yang berhubungan dengan praktek pertanian, pengaruh input, karakteristik transmigran dan lokasi. Sedangkan keberhasilan penyesuaian transmigran di tempat baru dipengaruhi oleh faktor-faktor: lokasi, budaya, ukuran komunitas, dan bentang fisik.

Sebelum transmigran di tempatkan, mereka terlebih dahulu melalui tahap-tahap kegiatan. Pertama kegiatan-kegiatan di daerah asal yang meliputi penerangan, pendaftaran dan seleksi, pendidikan dan latihan, kemudian pemberangkatan para transmigran ke lokasi pemukiman. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah penempatan meliputi pemilihan calon lokasi pemukiman transmigrasi selanjutnya melaksanakan penelitian sampai persiapan-persiapan menjadi pemukiman seperti jalan-jalan, rumah, jembatan, pasar dan lain-lain. Kemudian kegiatan berikut adalah pengaturan penempatan para transmigran, pembagian lahan, selanjutnya sampai pada tahap pembinaan kegiatan yang paling akhir adalah penyerahan lokasi pemukiman kepada Menteri Dalam Negeri (Siti Ismah Afwan, et al, 1983:13).

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi transmigran. Aspek sosial meliputi: Kesehatan, Keluarga Berencana, Kesenian, Olah Raga, Fasilitas Sosial ekonomi yang disediakan Pemerintah, Hubungan transmigran dengan daerah asal. Aspek ekonomi meliputi: usaha tani, Tenaga kerja anggota keluarga yang digunakan dalam usaha tani, pemasaran, transportasi dan komunikasi, pendapatan

transmigran, keadaan rumah, kepemilikan barang dan ternak.

5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai transmigrasi untuk bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan program pelaksanaan transmigrasi di masa datang. Di samping itu digunakan untuk melengkapi syarat menempuh ujian tingkat Sarjana di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

6. Hipotesis

1. Pendapatan transmigran umum lebih besar dibanding dengan pendapatan transmigran Lokal. Karena latar belakang pengalaman bertani transmigran Umum lebih baik dibanding dengan transmigran Lokal.
2. Semakin besar pendapatan keluarga, semakin besar frekuensi hubungan transmigran dengan daerah asal

7. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Alasan mengambil lokasi transmigrasi Rimbo Bujang sebagai daerah penelitian, mengingat proyek transmigrasi Rimbo Bujang merupakan transmigrasi terbesar yang ada di propinsi Jambi yang sudah selesai penempatannya (Desember 1981). Juga mengingat proyek transmigrasi Rimbo Bujang sampai saat ini telah berumur 4-10 tahun sudah saatnya diadakan penelitian untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi transmigran. Penelitian ini meru-

pakan studi kasus yang mengambil lokasi penelitian di Unit Pemukiman XI.

Unit pemukiman XI merupakan unit pemukiman termuda di lokasi transmigrasi Rimbo Bujang. Sampai saat ini unit pemukiman XI telah berumur 4(empat) tahun, berarti telah mencapai tahap pemantapan dan belum di serahkan pembinaannya kepada daerah setempat. Unit pemukiman XI ditempatkan 400 Kepala Keluarga transmigran, yang terdiri transmigran asal Jawa Tengah sebanyak 312 Kepala Keluarga dan transmigran lokal sebanyak 88 Kepala Keluarga.

2. Pemilihan Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga transmigran dari hasil penempatan pemerintah (termasuk transmigran lokal). Jumlah sampel yang di ambil sebanyak 150 Kepala Keluarga. Dengan perincian sebanyak 110 Kepala Keluarga transmigran Jawa Tengah dan sebanyak 40 Kepala Keluarga transmigran lokal. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tahap:

- a. Pertama kali dibuat daftar seluruh rumah tangga yang ada di Unit pemukiman beserta Kepala Keluarga masing-masing. Kemudian dari seluruh Kepala Keluarga yang terdaftar diambil sampel sebanyak 150 Kepala Keluarga, dengan perincian seperti telah disebut di atas.
- b. Cara pemilihan responden dilakukan dengan sistematik random sampling, yaitu dengan menggunakan

$$k = \frac{N}{n}$$

Keterangan:

k = interval

N = jumlah populasi

n = jumlah satuan elementer

Secara random dipilih unsur pertama dalam interval (K), maka unsur berikutnya berturut-turut diklasifikasikan dengan cara:

- Unsur kedua = unsur pertama + k
- Unsur ketiga = unsur pertama + 2k
- Unsur keempat = unsur pertama + 3k

dan seterusnya sampai mencapai jumlah sampel yang diinginkan. Keuntungan pengambilan sampel dengan cara sistematis random sampling adalah responden yang tersebar merata dapat diwakili.

3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder serta observasi di lapangan.

- a. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan kepala keluarga, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data primer yang perlu dikumpulkan meliputi: umur, pendidikan keluarga, jumlah keluarga/jumlah yang menjadi tanggungan keluarga, pendapatan, pemilikan rumah dan sejarahnya, pemilikan barang dan sejarahnya, luas lahan yang berhasil digarap, jarak rumah ke lahan usaha tani, jumlah jam kerja, besar modal yang digunakan dalam usaha tani, pemasaran, usaha tambahan di luar usaha tani, kesehatan, kesenian, olah raga, hubungan transmigran dengan daerah asalnya.
- b. Data sekunder diperoleh di kantor Kabupaten, kantor Kecamatan, Kantor Departemen Transmigrasi dan Instansi lain yang ada hubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi: letak, batas, luas dan keadaan tanah, iklim, topografi, perhubungan dan transportasi, keadaan penduduk.

- c. Observasi langsung ke lapangan untuk melengkapi penelitian ini, termasuk wawancara bebas dengan penduduk atau pejabat setempat.

4. Analisa Data

Data penelitian ini digunakan analisa univariate dan bivariate yang disajikan dalam bentuk tabel (Babbie, 1973:239-242). Univariate analisis untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat diskritif, sedangkan bivariate analisis mempunyai sifat analisis dua variabel bebas.

7. Konsep dan Definisi

1. Transmigrasi adalah merupakan pemindahan dan atau kepindahan tempat tinggal penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dan menetap yang masih dalam batas wilayah Republik Indonesia dalam kepentingannya pada pembangunan negara atau untuk sebab lain yang diperlukan oleh pemerintah (Hardjono, 1977:1981:2).

2. Transmigran adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela dipindahkan atau tidak menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) (Undang Undang Republik Indonesia, 1972:2).

Transmigrasi Pemerintah (Umum) adalah transmigrasi yang pembiayaannya sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah. Transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang pembiayaan pada dasarnya ditanggung oleh para transmigrasi, sanak keluarga atau dengan bantuan dana-dana dari masyarakat (peraturan Pemerintah R.I., 1973:2).

3. Pemukiman adalah kelompok unit-unit kediaman dari orang-orang atau kelompok-kelompok manusia pada suatu wilayah termasuk kegiatan-kegiatan serta fasilitas-fasilitas sebagai proses pembentukan pemukiman (Wuryanto

Abdullah dan Su Rito Hardoyo, 1981:1-2). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan orang-orang atau kelompok-kelompok manusia seperti tersebut di atas adalah transmigran, Unit pemukiman transmigran diartikan sub bagian dari pemukiman transmigrasi. Dalam penelitian ini adalah Unit pemukiman XI yang merupakan sub bagian dan pemukiman transmigrasi Rimbo Bujang.

5. Perkembangan diartikan perubahan-perubahan dari suatu yang kurang maju ke kesempurnaan (Bintarto, 1975: 15). Dalam penelitian ini adalah perkembangan unit pemukiman transmigrasi yang mencakup perkembangan fisik dan perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan fisik meliputi perubahan unit pemukiman dan perubahan fasilitas pemukiman. Sedangkan perkembangan sosial ekonomi meliputi pendapatan dan kegiatan usaha transmigran.

6. Taraf hidup (Kesejahteraan) yang layak bagi suatu masyarakat adalah terpenuhinya tingkat konsumsi nyata, sedangkan konsumsi nyata meliputi kebutuhan pokok (Soemitro Djojohadikusumo, 1976:2). Kebutuhan pokok meliputi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan dan pendidikan (Emil Salim, 1980:54).

7. Bekerja ialah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya paling sedikit satu jam sehari termasuk pekerjaan keluarga tanpa upah yang membantu usaha di sini ditanyakan jam kerja setiap hari dan juga dalam seminggu (SAKERNAS, 1976:XII).

8. Jumlah jam kerja dihitung untuk mereka yang bekerja dari sejak meninggalkan rumah dan kembali sampai ke rumah tidak termasuk jam kerja yang digunakan untuk hal di luar pekerjaan (SAKERNAS, 1976:XV).



9. Usaha tani adalah sebagian dari permukaan bumi di mana seorang petani, suatu keluarga tani atau badan tertentu lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak (Mosher, 1966:46).